

KLIPING BERITA

Sumber : NTB Satu

09 Juni 2023

Pemprov NTB Raih Opini WTP Ke-12 dari BPK



NTBSATU.com • 9 Juni 2023

0 212 2 minutes read



Anggota VI BPK RI Dr. Pius Lustrilang menyaksikan penandatanganan berkas penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2022. Foto : Istimewa

Mataram (NTB Satu) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi NTB Tahun 2022. Penyerahan dilaksanakan melalui Rapat Paripurna DPRD NTB yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD NTB Kamis 8 Juni 2023.

Dalam kesempatan tersebut Anggota VI BPK RI Dr. Pius Lustrilanang menyerahkan LHP BPK dan IHPD kepada Ketua DPRD Hj Baiq Isvie Rupaeda dan Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah yang disaksikan oleh Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan AKN VI Dwi Sabardiana, Kepala Perwakilan BPK NTB, Ade Iwan Ruswana, anggota DPRD NTB, Forkopimda, pimpinan OPD dan pihak terkait lainnya.

LHP atas LKPD ini diserahkan kepada DPRD dan Gubernur untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD, sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003.

Anggota VI BPK RI Dr. Pius Lustrilanang mengatakan, pemberian pendapat opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasarkan pada empat hal yaitu kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangserta efektifitas sistem pengendalian intern.

“Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun 2022 termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah NTB, maka BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Pius Lustrilanang.

Dengan pencapaian ini, Pemerintah Provinsi NTB telah meraih opini WTP 12 kali berturut-turut sejak tahun 2012. BPK RI memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi NTB atas pencapaian opini WTP tersebut.

Untuk diketahui, Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak secara khusus dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan.

Meski demikian jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara/daerah, hal ini harus diungkap dalam LHP BPK. Jika nilainya memenuhi batas materialitas tertentu dapat mempengaruhi opini terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan, bukan merupakan “jaminan” tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari. “Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK,” terangnya.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.(ZSF)